



STUDI EFEKTIFITAS PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN; SEBUAH PENDEKATAN ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

Study of the Effectiveness of Poverty Reduction Programs; an Analytic Hierarchy Process Approach

Andi Faisal Anwar¹, Rini Indah Sari²

^{1,2} Program Studi Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: faisal.anwar@uin-alauddin.ac.id

Article History: Received: 18 July 2021; Revised: 04 August 2021; Accepted: 15 August 2021

ABSTRAK

Alokasi anggaran pengentasan kemiskinan semakin besar dari waktu ke waktu. Namun, angka kemiskinan tidak mengalami perubahan yang berarti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas program kemiskinan yang selama ini diinisiasi oleh pemerintah, melalui program (KUBE, PANSIMAS, BUNDES, PNPM, dan P2KP), yang diyakini akan memperbaiki upaya pengentasan kemiskinan di Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, dengan metode analisis AHP (Analytic Hierarchy Process). Teknik pengumpulan data diperoleh dari kuesioner atau sumber data primer sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan BPS Sulawesi Selatan, BPS Bulukumba, Kantor Kecamatan dan instansi-instansi yang terkait di Kabupaten Bulukumba. Kebaruan dari penelitian ini yakni berupaya menelusur lebih jauh dan mengevaluasi program apa saja yang cukup efektif menurunkan angka kemiskinan, dengan bantuan expert choice dengan uji konsistensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan, program P2KP yang paling efektif menekan angka kemiskinan dengan program berbasis pemberdayaan usaha kecil, sedangkan dari program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, program PANSIMAS lebih konsisten dari program lainnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Implikasi dari penelitian ini yakni pemerintah setempat perlu mengevaluasi lebih jauh program pengentasan kemiskinan yang tidak efektif sehingga tidak terjadi misalokasi anggaran dan mampu mengakeselerasi efektifitas program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan.

Kata kunci: *Kemiskinan, Program, Efektifitas*

ABSTRACT

The budget allocation for poverty alleviation is getting bigger from time to time. However, the poverty rate did not change significantly. This study aims to determine the effectiveness of poverty programs that have been initiated by the government, through programs (KUBE, PANSIMAS, BUNDES, PNPM, and P2KP), which are believed to improve poverty alleviation efforts in Manyampa Village, Ujung Loe District, Bulukumba Regency. The research method used in this research is quantitative research, with the AHP (Analytic Hierarchy Process) analysis method. Data collection techniques were obtained



from questionnaires or primary data sources, while secondary data were obtained from reports from BPS South Sulawesi, BPS Bulukumba, District Offices and related agencies in Bulukumba Regency. The novelty of this study is to explore further and evaluate what programs are quite effective in reducing poverty rates, with the help of expert choice with a consistency test. The results of this study indicate that in poverty alleviation efforts, the P2KP program is the most effective in reducing poverty with small business empowerment-based programs, while from community empowerment-based programs, the PANSIMAS program is more consistent than other programs in poverty alleviation efforts. P2KP and the PANSIMAS program each got a score of $0.02 < 0.1$. It can be interpreted that the Inconsistency ratio < 0.1 (the maximum limit) is also tested to be consistent, it's just that the achievement is lower than other programs. The implication of this research is that the local government needs to further evaluate ineffective poverty alleviation programs so that budget misallocations do not occur and are able to accelerate effective poverty alleviation programs that have been running.

Keywords: *Poverty, Program, Effectiveness*

PENDAHULUAN

Studi terhadap kemiskinan berdasarkan pendekatan program maupun subsidi oleh pemerintah, semakin menarik untuk ditelusur lebih lanjut. Tidak sedikit program pengentasan kemiskinan justru berjalan inefisien dan inefektif di berbagai negara (Aiyedogbon, 2012; Alkire, 2007; Benfica & Henderson, 2020; Heitzmann & Matzinger, 2020; Pagliaro & Meneguzzo, 2020; Panda & Padhi, 2020; Refaeli & Achdut, 2020; Sharaunga & Mudhara, 2021). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba masih tergolong banyak, memasuki tahun 2016 jumlah penduduk miskin mencapai 31.500 orang dan kemudian tidak mengalami penurunan secara signifikan dalam lima tahun terakhir, yang mencapai 30.000 ribu orang di tahun 2020 (BPS Bulukumba, 2021).

Hal ini menandai bahwa program pengentasan kemiskinan yang menghabiskan banyak anggaran, belum berjalan secara efektif, hal itu nampak pada bahwa banyaknya program-program pengentasan kemiskinan, yang masuk di Kabupaten Bulukumba, baik di tingkat perkotaan bahkan hingga tingkat pedesaan, belum menunjukkan perubahan yang cukup berarti. Adapun program yang dimaksud antara lain program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), program Pelayanan Air Minum Dan Sinitas Bagi Masyarakat Miskin (PANSIMAS), program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), program Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan (P2KP) dan program Bantuan Unik Desa (BUNDES). Dibanyak wilayah, alokasi anggaran untuk proyek pengentasan kemiskinan seringkali berjalan asimetris terhadap pengentasan kemiskinan itu sendiri, hal ini menjadi paradoks tersendiri dalam upaya mereduksi angka kemiskinan (Ginting, 2019; Hirons, 2020; Kumah, Hilson, & Quaicoe, 2020; Prasetyo & Kistanti, 2020; Tuyen, 2015; Ukeje, Ogbulu, & Amaefula, 2020). Kemiskinan yang terjadi, banyak dipicu oleh rendahnya aksesibilitas terhadap pendidikan, kesehatan, faktor produksi seperti kepemilikan tanah, hingga ketiadaan akses terhadap permodalan. (Anwar & Aswandi, 2019; Belhadj & Kaabi, 2020; Janzen, Carter, &

Ikegami, 2020; Kasdi, 2020; Orji, Ogbuabor, Nwosu, Anthony-Orji, & Amoji, 2020; Qu & Weston, 2020).

Kebaruan dari penelitian ini yakni berupaya menelusur lebih jauh dan mengevaluasi program penegntasan kemiskinan yang telah berjalan, serta mengidentifikasi *supporting program* yang cukup efektif menurunkan angka kemiskinan, dengan bantuan *expert choice* dengan uji konsistensi, melalui pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP). Dalam tinjauan studi terdahulu Ilfa, (2020) kemiskinan Kabupaten Bulukumba ditinjau berdasarkan pemanfaatan perhutanan sosial melalui peran pemuda dengan pendekatan *Force Field Analysis* (FFA) dan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) sebagai upaya mereduksi kemiskinan. Sementara, riset ini mencoba mengukur efektifitas seluruh program kemiskinan pengentasan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah dan tidak terfokus dengan satu program saja, sehingga studi yang dilakukan lebih holistic dan spesifik.

Menurut Ragner Nurkse (Dalam Diwakar & Shepherd, 2021) bahwa kemiskinan terjadi akibat minimnya pendidikan, kesehatan, dan akses esensial lainnya. Manakala dilihat dari dimensi pendidikan, jika pendidikan seseorang rendah maka seseorang akan menjadi bodoh, hanya menjadi pekerja *unskilled labor* sehingga menjadi rentan dan jatuh dalam kemiskinan. Jika dilihat dari dimensi kesehatan, manakala seseorang sakit-sakitan, maka ia tidak akan bisa bekerja dan berpotensi menyebabkan kemiskinan. Terpuruknya seorang individu dan produktifitas yang rendah akan menggiring individu tersebut dalam *poverty traps*, sehingga Nurkse menyebut proses ini sebagai lingkaran setan kemiskinan atau *the vicious circle of poverty*.

Lingkaran setan kemiskinan menyiratkan konstelasi lingkaran kekuatan yang cenderung bereaksi satu sama lain, sedemikian rupa dan mengkondisikan negara miskin dalam keadaan kemiskinan.

Contoh konstelasi lingkaran seperti itu tidak sulit untuk dibayangkan, misalnya, orang miskin mungkin tidak cukup makan, kurang makan maka kesehatannya semakin lemah secara fisik, dan mengakibatkan kapasitas kerjanya semakin rendah sehingga mereka dapat menjadi miskin, situasi semacam ini, berkaitan dengan negara secara keseluruhan (Brooks-Gunn, Klebanov, Liaw, & Duncan, 2021; Diwakar & Shepherd, 2021; Koomson, Villano, & Hadley, 2020; Liu, Huang, Wang, & Shuai, 2021; Rauhut & Hatti, 2021; Serneels & Dercon, 2021; Titumir & Titumir, 2021).

Berbeda dengan World Bank, (2020); World Bank (Dalam Lakner,et.al, 2019) menggarisbawahi bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu untuk menghasilkan pendapatan diatas garis kemiskinan, yang diukur dengan 1,90 USD per hari. Hal tersebut merupakan standar global, untuk mengukur tingkat kemiskinan itu sendiri. Ditahun 2017, angka kemiskinan global diperkirakan telah menembus angka 9,2 persen dari total penduduk dunia. Namun, pasca Covid-19 merebak angka ini kemudian terus bertambah hingga 150 juta orang ditahun 2020. Pandemi ini semakin memperpanjang barisan

jumlah orang miskin, di berbagai negara akibat melambatnya roda perekonomian (Alkire, et.al, 2020).

Untuk itu Amartya Sen (Dalam Nevile, 2007) mencoba melihat kemiskinan lebih multidimensional dan menegaskan bahwa kemiskinan dapat ditanggulangi apabila hak-hak dasar dari kaum miskin ditegakkan. Kemiskinan disebabkan karena pemerintah tidak dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Pendidikan adalah hak seharusnya di miliki oleh masyarakat, agar dapat menunjang kehidupan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat dalam mencari penghidupan yang layak. Penyebab kemiskinan dalam hal ini disebabkan karena akibat ketiadaan akses yang dapat menunjang pemenuhan kehidupan manusia.

Selain itu, distribusi akses sumber daya ekonomi yang tidak merata menyebabkan rakyat miskin tidak dapat mengembangkan usaha produktifnya. Jika di lihat dari segi politik, rakyat miskin sangat sulit mengakses dan terlibat berbagai kebijakan publik, maka kebijakan tersebut tidak menguntungkan rakyat miskin (Alok, 2020; Basu, 2020; Betto, Garengo, & Lorenzoni, 2020; Bray, de Laat, Godinot, Ugarte, & Walker, 2020; Breunig & Majeed, 2020; Folarin & Adeniyi, 2020; Kimmitt, Muñoz, & Newbery, 2020; Lakner, Mahler, Negre, & Prydz, 2020; Marwell & Morrissey, 2020; Moss, Pinto, Srinivasan, Cronin, & Croyle, 2020; Palomino, Rodríguez, & Sebastian, 2020; Parolin & Wimer, 2020; Topuz & Erkanlı, 2020).

Amartya Sen (Dalam Semprebon, et.al, 2020) penyebab dari langgengnya kemiskinan, ketidak berdayaan, maupun keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Dalam hal ini, kemiskinan diakibatkan keterbatasan akses. Jika manusia mempunyai keterbatasan pilihan untuk mengembangkan hidupnya, akibatnya manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan. Dengan demikian, potensi manusia mengembangkan hidup menjadi terhambat dan kontribusinya pada kesejahteraan bersama menjadi lebih kecil. Aksesibilitas merupakan hak dasar, dimana terfasilitasinya kebebasan politik, kesempatan ekonomi, kesempatan sosial, pendidikan, kesehatan, transparansi, serta adanya jaring pengaman sosial (Batista, 2019; Bednar & Reames, 2020; Churchill, Smyth, & Farrell, 2020; Han, Meyer, & Sullivan, 2020; Kwilinski, Vyshnevskiy, & Dzwigol, 2020; Lubbers, Small, & García, 2020; Morris, Santos, & Neumeyer, 2020; Ridley, Rao, Schilbach, & Patel, 2020; Yamamori, 2019).

Titumir (2021) mengafirmasi bahwa gagasan Amartya Sen tersebut juga sejalan dengan Muhammad Yunus, dalam membaca persoalan kemiskinan. Fenomena kemiskinan tidak di ciptakan oleh orang miskin, tetapi di ciptakan oleh sistem. Adanya kemiskinan karena cacat fundamental dalam teori kapitalisme yang menonjolkan individualisme, mengabaikan aspek multidimensional manusia sebagai mahluk sosial. Bisnis sosial adalah solusi untuk menghapuskan kemiskinan dari muka bumi. kemiskinan tidak dapat dilihat dari segi ekonomi semata, namun variabel non-ekonomi juga penting dimasukkan dalam instrumen

mereduksi kemiskinan (Bradshaw, Chant, & Linneker, 2019; Chakravarty & Lugo, 2019; Fransman & Yu, 2019; Gordon, 2019; Lakner et al., 2019; Scarpellini, Hernández, Moneva, Portillo-Tarragona, & Rodríguez, 2019; Scheyvens & Hughes, 2019; Thurlow, Dorosh, & Davis, 2019; Watmough et al., 2019).

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) terhadap pilihan kebijakan ekonomi. Data kuantitatif ini berupa data primer yaitu data yang disusun menurut hasil wawancara terhadap responden berdasarkan kuisioner dengan variabel tertentu. Dalam penelitian ini, selain menggunakan sumber data primer, juga menggunakan data sekunder dari BPS Kabupaten Bulukumba dan BPS Sulawesi Selatan, serta data dari profil Desa Manyampa, Kabupaten Bulukumba. Selain itu juga terdapat studi literatur baik buku, publikasi jurnal, serta sumber data terbitan beberapa instansi tertentu.

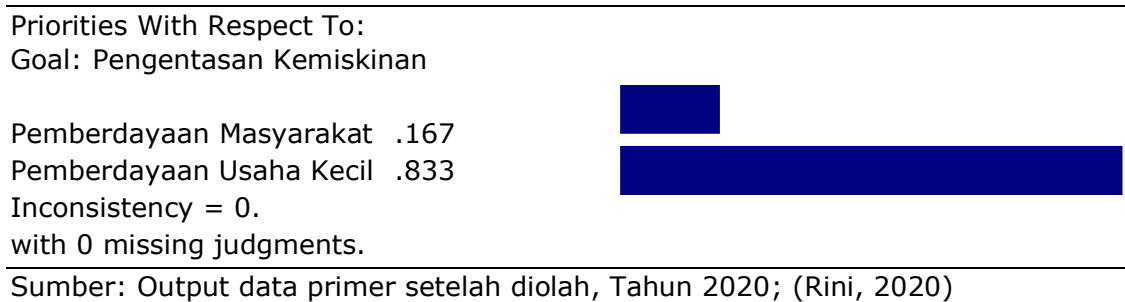
Data primer yang dikumpulkan bersumber dari responden terpilih berdasarkan rumus Slovin. Jumlah responden dalam penelitian ini sebesar 98 orang dengan jumlah populasi sebesar 5.242 orang. Responden merupakan masyarakat yang telah menerima bantuan dari program pengentasan kemiskinan (KUBE, PANSIMAS, PNPM, P2KP dan BUNDES). Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Alasan pemilihan lokasi sebab daerah ini merupakan salahsatu sentrum kemiskinan yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa pilihan alternatif program dan prioritasnya dalam upaya mengurangi kemiskinan di lokasi penelitian. Metode ini untuk memecahkan situasi yang tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap program pengentasan kemiskinan, dan menetapkan program mana yang memiliki prioritas paling tinggi, untuk mengetahui efektifitas program (Chang, 1996; Chen et al., 2021; Leal, 2020; Lin & Kou, 2021; Szatmári, 2021; Tashayo, Honarbakhsh, Akbari, & Eftekhari, 2020; Wolnowska & Konicki, 2019, 2019; Zhü, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

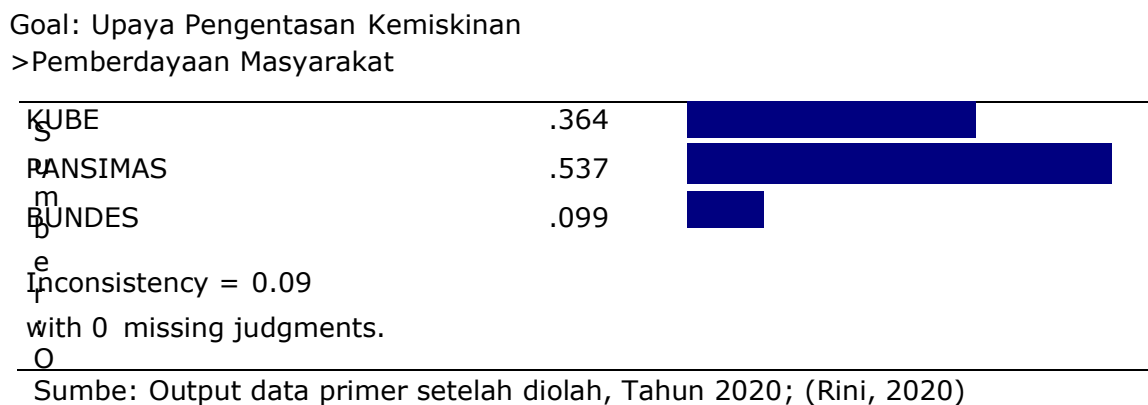
Merujuk pada perbandingan antara kriteria pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha kecil, jika di lihat dari hasil olahan *expert choice* lebih dominan ke pemberdayaan usaha kecil dengan nilai sebanyak 83 orang dan pemberdayaan masyarakat mencapai 16 orang. Dengan demikian, pemberdayaan usaha kecil menunjukkan tingkat prioritas yang lebih tinggi.

Grafik 1. Hasil perbandingan kriteria pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha kecil



Jika dilihat dari jenis program yang paling efektif dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin, maka tingkat prioritas yang paling tinggi yaitu program PANSIMAS dengan tingkat keterpilihan sebanyak 53 orang. Disusul oleh program KUBE sebanyak 36 orang dan terakhir program BUNDES yang memiliki nilai prioritas sangat rendah sebesar 9 orang. Mencermati program pemberdayaan masyarakat miskin ini, nampaknya program PANSIMAS menjadi prioritas tertinggi, mengungguli program lainnya. Padahal ketiga program pengentasan kemiskinan yang masuk didaerah ini, telah berlangsung lama ditengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, nampaknya program PANSIMAS nampaknya jauh lebih dianggap lebih baik dibanding program lainnya.

Grafik 2 Perbandingan Antara Alternatif-Alternatif dari Kriteria Pemberdayaan Masyarakat



Tabel 1. Skala banding berpasangan alternatif dari kriteria pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat	KUBE	PANSIMAS	BUNDES
KUBE	1	0,5	0,2
PANSIMAS	2	1	0,25
BUNDES	5	4	1
Jumlah	8	0,5	1,45

Sumber: Output data primer setelah diolah, Tahun 2020; (Rini, 2020).

Tabel 2. Normalisasi kriteria pemberdayaan masyarakat

0,125	0,1	0,14
0,25	0,18	0,17
0,625	0,72	0,69
1,00	1,00	1,00

Sumber: Output data primer setelah diolah, Tahun 2020; (Rini, 2020).

Skala banding berpasangan ini membandingkan ketiga alternatif program pengentasan kemiskinan dari kriteria pemberdayaan masyarakat, nilai dari skala banding berpasangan di dapatkan dari hasil responden, kemudian hasil dari responden dibandingkan dengan alternatif, kemudian mendapatkan hasil skala berbanding berpasangan. Selanjutnya, nilai dari jumlah skala berbanding berpasangan di bagi dengan nilai kriteria dan jumlah skala banding berpasangan, kemudian di jumlahkan sehingga mendapatkan nilai rata-rata dari masing-masing alternatif. Nampak dalam tabel normalisasi matriks menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1,0.

Tabel 3. Hasil perkalian matriks kriteria pemberdayaan masyarakat

$(1 \times 0,12) + (0,5 \times 0,20) + (0,2 \times 0,68)$	$0,12 + 0,1 + 0,136$	1,68
$(2 \times 0,12) + (1 \times 0,20) + (0,25 \times 0,68)$	$0,24 + 0,20 + 0,17$	0,61
$(5 \times 0,12) + (4 \times 0,20) + (1 \times 0,68)$	$06 + 0,8 + 0,68$	2,08

Sumber: Output data primer setelah diolah, Tahun 2020; (Rini, 2020).

Perkalian matriks di dapatkan dari hasil perkalian jumlah nilai responden dikalikan dengan hasil rata-rata yang di dapatkan dari hasil normalisasi matriks, kemudian di jumlahkan sehingga mendapatkan nilai untuk program pemberdayaan masyarakat, maka menunjukkan capaian jenis program KUBE (0,356), PANSIMAS (0,61), dan BUNDES (2,08).

Setelah hasil perkalian matriks ditentukan, selanjutnya penentuan nilai maksimum, yang tentunya didapatkan dari hasil perkalian matriks, hasil dari perkalian matriks dibagi dengan hasil rata-rata, hasil dari pembagian di jumlahkan kemudian di bagi dengan jumlah alternatif sehingga nilai maksimum untuk program pemberdayaan masyarakat mencapai 3,026.

$$\begin{aligned}
 &= (0,356:0.12) + (0,61:0,20) + (2,0,8:0.68) \\
 &= 2,97+3,05+3,58: 3 \\
 &= 3,026
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, nilai *consistency index* di dapatkan dari hasil nilai maksimum, dari hasil maksimum yang di dapatkan di kurang dengan jumlah kriteria kemudian dibagi dengan hasil dari jumlah kriteria yang dibagikan dengan satu, (nilai $\max-n$)/($n-1$) atau $(3,026-3)/(3-1)= 0,013$. Dari hasil tersebut didapatkan nilai *consistency index* sebesar 0,013.

Tabel 4. Random index kriteria pemberdayaan masyarakat

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.I	0	0	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1.49

Sumber:Output data primer setelah diolah, Tahun 2020; (Rini, 2020).

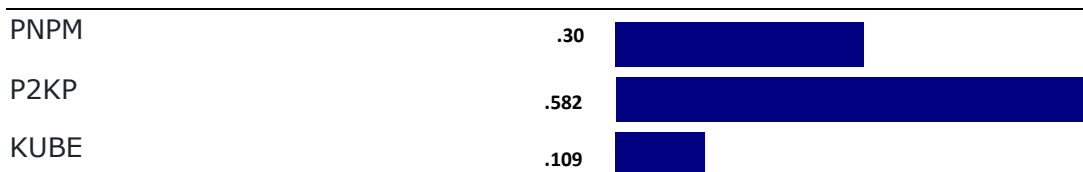
$$= (0,013/0,58)$$

$$= 0,02 < 0,1 \text{ (Consistency Ratio)}$$

Consistency Ratio merupakan hasil pembagian CI dibagi dengan RI sehingga didapatkan hasil $0,02 < 0,1$. Untuk mengetahui dari hasil skala banding berpasangan apakah konsisten atau tidak, maka dapat diuji dengan uji konsistensi untuk mendapatkan nilai CR, dari kriteria pemberdayaan masyarakat nilai CR ditemukan sebesar 0,02. Hasil yang didapatkan tersebut, sesuai dengan uji konsistinsi, sehingga dapat dikatakan konsisten.

Grafik.3 Perbandingan Antara Alternatif-Alternatif dari Kriteria Pemberdayaan Usaha Kecil

Goal: Pengentasan Kemiskinan
>Pemberdayaan Usaha Kecil



Inconsistency = 0.00352

with 0 missing judgments.

Sumber:Output data primer setelah diolah, Tahun 2020; (Rini, 2020)

Jika dilihat dari jenis program yang paling efektif dalam hal pemberdayaan usaha kecil, maka yang memiliki tingkat prioritas yang paling tinggi yaitu program P2KP, yang dipilih sebanyak 58 orang, disusul program PNPM sebanyak 30 orang dan terakhir program KUBE sebanyak 10 orang.

Tabel 5. Skala banding berpasangan alternatif dari kriteria pemberdayaan usaha kecil

Pemberdayaan Usaha Kecil	PNPM	P2KP	KUBE
PNPM	1	2	4
P2KP	0,5	1	3
KUBE	0,25	0,33	1
JUMLAH	1,75	3,33	8

Sumber:Output data primer setelah diolah, Tahun 2020; (Rini, 2020).

Tabel 6. Normalisasi Kriteria Pemberdayaan Usaha Kecil

0,57	0,60	0,5
0,29	0,30	0,375
0,14	0,10	0,125
1,00	1,00	1,00

Sumber: Output data primer setelah diolah, Tahun 2020; (Rini, 2020).

Sama halnya dengan pemberdayaan usaha masyarakat, nilai rata-rata untuk pemberdayaan usaha kecil dari masing-masing alternatif, menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1,0, berdasarkan tabel normalisasi matriks. Sementara jika dilihat dari tabel perkalian matriks, menunjukkan program PNPM sebesar (1,68) dan P2KP (0,96), serta KUBE (0,37).

Tabel. 7 Hasil Perkalian Matriks Kriteria Pemberdayaan Usaha Kecil

$(1 \times 0,56) + (2 \times 0,32) + (4 \times 0,12)$	$0,56 + 0,64 + 0,48$	1,68
$(0,5 \times 0,56) + (1 \times 0,32) + (3 \times 0,12)$	$0,28 + 0,32 + 0,36$	0,96
$(0,25 \times 0,56) + (0,33 \times 0,32) + (1 \times 0,12)$	$0,14 + 0,11 + 0,12$	0,37

Sumber: Output data primer setelah diolah, Tahun 2020; (Rini, 2020).

Nilai Maksimum di dapatkan dari hasil perkalian matriks, hasil dari perkalian matriks di bagi dengan hasil rata-rata, hasil dari pembagian di jumlahkan kemudian di bagi dengan jumlah alternatif sehingga nilai maksimum mendapatkan nilai 3,03.

$$= (1,68:0,56) + (0,96:0,32) + (0,37:0,12)$$

$$= 3+3+3,1:3$$

$$= 3,03$$

Selanjutnya nilai *consistency index* yang didapatkan mencapai 0,015. (nilai $\max-n / (n-1)$) atau $(3,03-3) / (3-1) = 0,013$. Dari hasil tersebut didapatkan nilai *consistency index* sebesar 0,015. Sementara jika dilihat dari, nilai *random index* yang didapatkan yakni sebesar 0,058.

Tabel 8. Random Index Kriteria Pemberdayaan Usaha Kecil

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.I	0	0	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Sumber: Output data primer setelah diolah, Tahun 2020; (Rini, 2020).

$$= (0,015/0,58)$$

$$= 0,02$$

Consistency ratio di dapatkan dari hasil pembagian CI dibagi dengan RI, yakni sebesar $0,02 < 0,1$. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hasil skala banding berpasangan apakah konsisten dan dapat di uji dengan uji konsistensi, untuk mendapatkan nilai CR. Untuk itu, dari kriteria pemberdayaan usah kecil diperoleh

nilai sebesar CR 0,02, sehingga hasil uji konsistensi untuk pemberdayaan usaha kecil, dapat dikatakan konsisten (nilai CR $0,02 < 0,1$).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka interpretasi model secara rinci atau spesifik mengenai hasil pengujian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Usaha Kecil

Jika mengkomparasi kriteria program pengentasan kemiskinan yang ada berdasarkan olahan *expert choice*, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dua kriteria tersebut yang paling tinggi tingkat skala prioritasnya adalah kriteria berbasis pemberdayaan usaha kecil sebesar 83. Namun, untuk kriteria pemberdayaan masyarakat hanya mendapatkan nilai 16, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil, jauh lebih efektif untuk membantu para kaum miskin sehingga dapat berkontribusi mereduksi angka kemiskinan di daerah tersebut. Program tersebut lebih berkontributif bagi penerima manfaat karena masyarakat yang berada di Desa Manyampa, Kabupaten Bulukumba dominan memiliki usaha kecil. Selain itu, pemberdayaan usaha kecil lebih diminati oleh warga karena program ini dapat diberikan kepada siapa saja, untuk semua jenis usaha sehingga masyarakat miskin cukup terbantu dengan adanya program ini.

Sejalan dengan temuan Barrett, et.al, (2019) bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan baik jika pemerintah berupaya meningkatkan aksesibilitas terhadap permodalan sehingga mampu menaikkan *socio-economic capability* kelompok rentan. Program pemberdayaan masyarakat miskin tidak diukur dengan semakin banyaknya program- program pengentasan kemiskinan, melainkan efektifitas dari program itu sendiri. Kemampuan pemerintah mengelola program pengentasan kemiskinan dengan baik, akan menggiring kondisi penghidupan masyarakat miskin keluar dari *poverty traps* (Barrett et al., 2019; Guo, Zhou, & Liu, 2019; Mahadevan & Suardi, 2019; Masron & Subramaniam, 2019; Meinzen-Dick, Quisumbing, Doss, & Theis, 2019; Shabbir, Abbas, Aman, Ali, & Orangzeb, 2019).

2. Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Terkait dengan program pengentasan kemiskinan berbasis pada pemberdayaan masyarakat miskin, hasil olahan *expert choice* menunjukkan pemilihan alternatif yang paling tinggi tingkat skala prioritasnya adalah program PANSIMAS (Program Nasional Pelayanan Air Minum dan Sanitasi) mendapatkan nilai sebanyak 53,7. Dari uji konsistensi dari tiga alternatif tersebut mendapatkan hasil konsisten sebesar 0,02 hasilnya tersebut dapat dikatakan konsisten dikarenakan nilai capaiannya $< 0,1$ sehingga dikatakan konsisten. Program PANSIMAS jika dilihat dari segi indikator, program ini sangat tepat karena program ini berada ditingkat desa yang membutuhkan intervensi oleh pemberi

manfaat. Sekin itu, program PANSIMAS ini secara khusus menyediakan air bersih, dan benar-benar dibutuhkan kebanyakan warga yang kekurangan air bersih. Setelah itu, ditempat kedua terdapat program KUBE dengan keterpilihan sebanyak 36 orang, dikarenakan program ini hanya diberikan kepada yang berminat jenis usaha beternak. Namun program ini terbatas pembagiannya terhadap masyarakat. Ditempat terakhir, terdapat program BUNDES yang memiliki nilai sangat rendah sebesar 09,9 karena program ini hanya di berikan kepada petani miskin secara terbatas.

Sejalan dengan temuan Zhou, et.al (2019) aksesibilitas terhadap fasilitas dasar, seperti rumah, sanitasi dan air minum yang layak sangat esensial meningkatkan taraf hidup kelompok rentan miskin. Kemiskinan lahir atas memburuknya taraf hidup masyarakat akibat tidak terpenuhinya fasilitas dasar bagi masyarakat miskin (Kangas & Ritakallio, 2019; Kronauer, 2019; Santos, Dabus, & Delbianco, 2019; Selwyn, 2019; Walker, 2019; Zhou et al., 2019).

3. Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Kecil

Berdasarkan hasil olahan *expert choice*, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan alternatif yang paling tinggi tingkat skala prioritasnya adalah program P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan/pedesaan) dengan nilai 58,2 dari tiga alternatif program yang berbasis pemberdayaan usaha kecil. Hasil dari uji konsistensi dari tiga program atau alternatif menunjukkan bahwa hasil tersebut konsisten karna mendapatkan hasil 0,02 hasil tersebut menunjukkan konsisten karena nilainya $<0,1$. Program P2KP ini dilihat dari sisi indikator program dapat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, program berjalan efektif sesuai dengan indikator yang ada, karena program ini memiliki indikator penguatan sumberdaya, hal ini sejalan dengan apa yang di inginkan pemerintah sebagai upaya mereduksi angka kemiskinan. Upaya mereduksi kemiskinan dari pedesaan merupakan langkah nyata, agar kantong-kantong kemiskinan yang mayoritas berada dipedesaan dapat lebih massif.

Sejalan dengan temuan Nursini, (2020) yang meneliti pengaruh pemberdayaan UMKM terhadap upaya untuk mereduksi kemiskinan. Ia menemukan bahwa pengembangan UKM dan UMK berpengaruh signifikan terhadap semua indikator pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM dapat menurunkan persentase penduduk miskin, jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, dan disparitas rata-rata pengeluaran penduduk miskin. Peningkatan output UKM signifikan dalam mengurangi persentase penduduk miskin dan kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin melalui penyerapan tenaga kerja di UKM. Hanya saja, pertumbuhan output UMKM masih didominasi oleh pemilik, sedangkan buruh pada umumnya belum mendapatkan kompensasi yang dapat mengatasi masalah kemiskinannya. Sentralisasi pembangunan, termasuk

program yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, kebanyakan tersentralisir dititik yang tidak tepat, sehingga program untuk mereduksi kemiskinan itu sendiri mengalami staganasi. Pemerintah perlu meningkatkan pendapatan masyarakat secara serius, melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan sehingga kebijakan ekonomi tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan seluruh penduduk miskin, agar dapat terbebas dari kemiskinan. Kebutuhan penduduk miskin di pedesaan sangat kompleks, misalnya ada kebutuhan akan pekerjaan, sarana prasaran pertanian mekanis dan pengembangan produk lokal, serta peningkatan kegiatan ekonomi yang meningkatkan pendapatan masyarakat (Bossert, Chakravarty, & d'Ambrosio, 2019; Bourguignon & Chakravarty, 2019; King, Smart, & Manville, 2019; Sutter, Bruton, & Chen, 2019; Zhou & Liu, 2019).

KESIMPULAN / CONCLUTIONS

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, terkait efektifitas program pengentasan kemiskinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis kegiatan yang paling efektif mengurangi angka kemiskinan kemiskinan adalah program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan usaha kecil. Manakala dilihat dari masing-masing jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan ini, maka program Pelayanan Air Minum Dan Sanitas Bagi Masyarakat Miskin (PANSIMAS), merupakan program pemberdayaan masyarakat yang paling efektif dibandingkan dengan program pemberdayaan masyarakat lainnya seperti (KUBE dan BUNDES). Berbeda dengan kegiatan berbasis pemberdayaan usaha kecil, nampaknya program bantuan P2KP (Program pengentasan kemiskinan pedesaan/perkotaan) memperlihatkan efektifitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan program pemberdayaan usaha kecil lainnya. Implikasi dari penelitian ini yakni pemerintah setempat perlu me ngevaluasi lebih jauh program pengentasan kemiskinan yang tidak efektif sehingga tidak terjadi misalokasi anggaran dan mampu mengakeselerasi efektifitas program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Aiyedogbon, J. O. (2012). *Poverty and youth Unemployment in Nigeria , 1987-2011*. 3(20), 269–279.
- (2) Alkire, S, Dirksen, J., Nogales, R., & Oldiges, C. (2020). *Multidimensional poverty and COVID-19 risk factors: A rapid overview of interlinked deprivations across 5.7 billion people*. University of Oxford.
- (3) Alkire, Sabina. (2007). *Choosing Dimensions: The Capability Approach and Multidimensional Poverty*. 89–90.
- (4) Alok, A. (2020). Problem of poverty in India. *International Journal of Research and Review (Ijrrjournal. Com)*, 7(1).

- (5) Anwar, A. F., & Aswandi, K. (2019). Silang Sengkarut Pembangunan Berkelanjutan Perkotaan Dalam Pusaran Kapital (Studi Kasus: Megaprojek Reklamasi CPI Makassar). *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9540>
- (6) Bank, W. (2020). *Monitoring Global Poverty*.
- (7) Barrett, C. B., Carter, M. R., Chavas, J.-P., & Carter, M. R. (2019). *The economics of poverty traps*. University of Chicago Press Chicago.
- (8) Basu, R. L. (2020). Poverty Removal Measures of Amartya Sen and the Smithian Dilemma. *Revista Científica Arbitrada de La Fundación MenteClara*, 5, 115.
- (9) Batista, A. R. de A. (2019). DESIGUALDADE E POBREZA: Uma revisão de textos selecionados de Hausman e McPerson, Amartya Sen e Amartya Sen e Anand [INEQUALITY AND POVERTY: A review of selected texts by Hausman and McPerson, Amartya Sen and Amartya Sen and Anand]. *MPRA Paper*, (97556).
- (10) Bednar, D. J., & Reames, T. G. (2020). Recognition of and response to energy poverty in the United States. *Nature Energy*, 5(6), 432–439.
- (11) Belhadj, B., & Kaabi, F. (2020). New membership function for poverty measure. *Metroeconomica*, 71(4), 676–688. <https://doi.org/10.1111/meca.12297>
- (12) Benfica, R., & Henderson, H. (2020). The Effect of the Sectoral Composition of Economic Growth on Rural and Urban Poverty. *Review of Income and Wealth*, (0). <https://doi.org/10.1111/roiw.12462>
- (13) Betto, F., Garengo, P., & Lorenzoni, A. (2020). A new measure of Italian hidden energy poverty. *Energy Policy*, 138, 111237.
- (14) Bossert, W., Chakravarty, S. R., & d'Ambrosio, C. (2019). Poverty and time. In *Poverty, Social Exclusion and Stochastic Dominance* (pp. 63–82). Springer.
- (15) Bourguignon, F., & Chakravarty, S. R. (2019). The measurement of multidimensional poverty. In *Poverty, social exclusion and stochastic dominance* (pp. 83–107). Springer.
- (16) Bradshaw, S., Chant, S., & Linneker, B. (2019). Challenges and changes in gendered poverty: The feminization, de-feminization, and re-feminization of poverty in Latin America. *Feminist Economics*, 25(1), 119–144.
- (17) Bray, R., de Laat, M., Godinot, X., Ugarte, A., & Walker, R. (2020). Realising poverty in all its dimensions: A six-country participatory study. *World Development*, 134, 105025.

- (18) Breunig, R., & Majeed, O. (2020). Inequality, poverty and economic growth. *International Economics*, 161, 83–99.
- (19) Brooks-Gunn, J., Klebanov, P., Liaw, F., & Duncan, G. (2021). Toward an understanding of the effects of poverty upon children. In *Children of poverty* (pp. 3–41). Routledge.
- (20) Chakravarty, S. R., & Lugo, M. A. (2019). Multidimensional indicators of inequality and poverty. *Poverty, Social Exclusion and Stochastic Dominance*, 223–259.
- (21) Chang, D. (1996). *Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP*. 2217(95).
- (22) Chen, J., Chen, S., Fu, R., Wang, C., Li, D., Jiang, H., ... Mei, Y. (2021). Simulation of water hyacinth growth area based on multi-source geographic information data: An integrated method of WOE and AHP. *Ecological Indicators*, 125, 107574. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107574>
- (23) Churchill, S. A., Smyth, R., & Farrell, L. (2020). Fuel poverty and subjective wellbeing. *Energy Economics*, 86, 104650.
- (24) Diwakar, V., & Shepherd, A. (2021). Sustaining escapes from poverty. *World Development*, 105611.
- (25) Folarin, O., & Adeniyi, O. (2020). Does tourism reduce poverty in sub-Saharan African countries? *Journal of Travel Research*, 59(1), 140–155.
- (26) Fransman, T., & Yu, D. (2019). Multidimensional poverty in South Africa in 2001–16. *Development Southern Africa*, 36(1), 50–79.
- (27) Ginting, A. L. (2019). Interelasi Pengeluaran Pemerintah dan Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(2), 230. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i2.10957>
- (28) Gordon, D. (2019). The scientific measurement of poverty: Recent theoretical advances. In *Researching poverty* (pp. 37–58). Routledge.
- (29) Guo, Y., Zhou, Y., & Liu, Y. (2019). Targeted poverty alleviation and its practices in rural China: A case study of Fuping county, Hebei Province. *Journal of Rural Studies*.
- (30) Han, J., Meyer, B. D., & Sullivan, J. X. (2020). *Income and Poverty in the COVID-19 Pandemic*. National Bureau of Economic Research.
- (31) Heitzmann, K., & Matzinger, S. (2020). The (changing) consideration of social investment in the design of welfare benefits: The case of poverty relief in Austria. *Social Policy and Administration*, (May), 1–16. <https://doi.org/10.1111/spol.12643>

- (32) Hirons, M. (2020). How the Sustainable Development Goals risk undermining efforts to address environmental and social issues in the small-scale mining sector. *Environmental Science & Policy*, 114, 321–328.
- (33) Ilfa, A. A. (2020). *PARTISIPASI PEMUDA DALAM PENGELOLAAN PERUTANAN SOSIAL*. Universitas Hasanuddin.
- (34) Janzen, S. A., Carter, M. R., & Ikegami, M. (2020). Can insurance alter poverty dynamics and reduce the cost of social protection in developing countries? *Journal of Risk and Insurance*, (March 2019), 1–32. <https://doi.org/10.1111/jori.12322>
- (35) *Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2021.pdf*. (n.d.).
- (36) Kangas, O., & Ritakallio, V.-M. (2019). Different methods-different results? Approaches to multidimensional poverty. In *Empirical poverty research in a comparative perspective* (pp. 167–204). Routledge.
- (37) Kasdi, M. F. (2020). Transformation Of Social And Economic Livelihoods Of Rubber Farmers. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(2), 198. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i2.17946>
- (38) Kemiskinan, T., Kawasan, D. I., Indonesia, T., & Amalia, F. (2012). *PENGARUH PENDIDIKAN, PENGANGGURAN DAN INFLASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI) PERIODE 2001-2010 Fitri Amalia**. X, 158–169.
- (39) Kimmitt, J., Muñoz, P., & Newbery, R. (2020). Poverty and the varieties of entrepreneurship in the pursuit of prosperity. *Journal of Business Venturing*, 35(4), 105939.
- (40) King, D. A., Smart, M. J., & Manville, M. (2019). The poverty of the carless: Toward universal auto access. *Journal of Planning Education and Research*, 0739456X18823252.
- (41) Koomson, I., Villano, R. A., & Hadley, D. (2020). Effect of financial inclusion on poverty and vulnerability to poverty: Evidence using a multidimensional measure of financial inclusion. *Social Indicators Research*, 149(2), 613–639.
- (42) Kronauer, M. (2019). 'Social exclusion' and 'underclass'-new concepts for the analysis of poverty. In *Empirical poverty research in a comparative perspective* (pp. 51–76). Routledge.
- (43) Kumah, C., Hilson, G., & Quaicoe, I. (2020). Poverty, adaptation and vulnerability: An assessment of women's work in Ghana's artisanal gold mining sector. *Area*, 52(3), 617–625.
- (44) Kwilinski, A., Vyshnevskyi, O., & Dzwigol, H. (2020). Digitalization of the EU Economies and People at Risk of Poverty or Social Exclusion. *Journal of*

Risk and Financial Management, 13(7), 142.

- (45) Lakner, C., Mahler, D. G., Negre, M., & Prydz, E. B. (2019). How much does reducing inequality matter for global poverty? *World Bank Policy Research Working Paper*, (8869).
- (46) Lakner, C., Mahler, D. G., Negre, M., & Prydz, E. B. (2020). *How much does reducing inequality matter for global poverty?*
- (47) Leal, J. E. (2020). *MethodsX AHP-express : A simplified version of the analytical hierarchy process method*. 7. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.11.021>
- (48) Lin, C., & Kou, G. (2021). A heuristic method to rank the alternatives in the AHP synthesis. *Applied Soft Computing Journal*, 100, 106916. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106916>
- (49) Liu, J., Huang, F., Wang, Z., & Shuai, C. (2021). What is the anti-poverty effect of solar PV poverty alleviation projects? Evidence from rural China. *Energy*, 218, 119498.
- (50) Lubbers, M. J., Small, M. L., & García, H. V. (2020). Do networks help people to manage poverty? Perspectives from the field. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 689(1), 7–25.
- (51) Mahadevan, R., & Suardi, S. (2019). Panel evidence on the impact of tourism growth on poverty, poverty gap and income inequality. *Current Issues in Tourism*, 22(3), 253–264.
- (52) Marwell, N. P., & Morrissey, S. L. (2020). Organizations and the governance of urban poverty. *Annual Review of Sociology*, 46, 233–250.
- (53) Masron, T. A., & Subramaniam, Y. (2019). Does poverty cause environmental degradation? Evidence from developing countries. *Journal of Poverty*, 23(1), 44–64.
- (54) Meinzen-Dick, R., Quisumbing, A., Doss, C., & Theis, S. (2019). Women's land rights as a pathway to poverty reduction: Framework and review of available evidence. *Agricultural Systems*, 172, 72–82.
- (55) Morris, M. H., Santos, S. C., & Neumeyer, X. (2020). Entrepreneurship as a solution to poverty in developed economies. *Business Horizons*, 63(3), 377–390.
- (56) Moss, J. L., Pinto, C. N., Srinivasan, S., Cronin, K. A., & Croyle, R. T. (2020). Persistent poverty and cancer mortality rates: An analysis of county-level poverty designations. *Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers*, 29(10), 1949–1954.
- (57) Nevile, A. (2007). Amartya K. Sen and social exclusion. *Development in*

- Practice*, 17(2), 249–255. <https://doi.org/10.1080/09614520701197200>
- (58) Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.1080/21665095.2020.1823238>
- (59) Orji, A., Ogbuabor, J. E., Nwosu, E., Anthony-Orji, O. I., & Amoji, N. (2020). Analysis of Poverty Correlates and Multi-Dimensionality in South East Nigeria: New Empirical Evidence From Survey Data. *Poverty and Public Policy*, 12(3), 255–270. <https://doi.org/10.1002/pop4.284>
- (60) Pagliaro, M., & Meneguzzo, F. (2020). Distributed Generation from Renewable Energy Sources: Ending Energy Poverty across the World. *Energy Technology*, 8(7), 1–7. <https://doi.org/10.1002/ente.202000126>
- (61) Palomino, J. C., Rodríguez, J. G., & Sebastian, R. (2020). Wage inequality and poverty effects of lockdown and social distancing in Europe. *European Economic Review*, 129, 103564.
- (62) Panda, S., & Padhi, B. (2020). Poverty and inequality in Odisha, India. *Journal of Public Affairs*, (January), 1–16. <https://doi.org/10.1002/pa.2220>
- (63) Parolin, Z., & Wimer, C. (2020). Forecasting estimates of poverty during the COVID-19 crisis. *Poverty and Social Policy Brief*, 4(8).
- (64) Prasetyo, P. E., & Kistanti, N. R. (2020). Human capital, institutional economics and entrepreneurship as a driver for quality & sustainable economic growth. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(4), 2575.
- (65) Qu, L., & Weston, R. (2020). Financial journeys of Australian parents after separation – transitions into and out of poverty. *Australian Journal of Social Issues*, 1–24. <https://doi.org/10.1002/ajs4.115>
- (66) Rauhut, D., & Hatti, N. (2021). Capability deprivation and poverty: Amartya sen revisited. In *Poverty in Contemporary Economic Thought* (pp. 158–171). Routledge.
- (67) Refaeli, T., & Achdut, N. (2020). Perceived poverty, perceived income adequacy and loneliness in Israeli young adults: Are social capital and neighbourhood capital resilience factors? *Health and Social Care in the Community*, (July), 1–17. <https://doi.org/10.1111/hsc.13177>
- (68) Ridley, M., Rao, G., Schilbach, F., & Patel, V. (2020). Poverty, depression, and anxiety: Causal evidence and mechanisms. *Science*, 370(6522).
- (69) Santos, M. E., Dabus, C., & Delbianco, F. (2019). Growth and poverty revisited from a multidimensional perspective. *The Journal of Development Studies*, 55(2), 260–277.

- (70) Scarpellini, S., Hernández, M. A. S., Moneva, J. M., Portillo-Tarragona, P., & Rodríguez, M. E. L. (2019). Measurement of spatial socioeconomic impact of energy poverty. *Energy Policy*, *124*, 320–331.
- (71) Scheyvens, R., & Hughes, E. (2019). Can tourism help to “end poverty in all its forms everywhere”? The challenge of tourism addressing SDG1. *Journal of Sustainable Tourism*.
- (72) Selwyn, B. (2019). Poverty chains and global capitalism. *Competition & Change*, *23*(1), 71–97.
- (73) Semprebon, E., Porsse, M. de C. S., Gurak, E. C., & Dameto, F. (2020). Explaining poverty and business with network concepts analysis. *Business and Society Review*, *125*(3), 311–327. <https://doi.org/10.1111/basr.12199>
- (74) Serneels, P., & Dercon, S. (2021). Aspirations, Poverty, and Education. Evidence from India. *The Journal of Development Studies*, *57*(1), 163–183.
- (75) Shabbir, M. S., Abbas, M., Aman, Q., Ali, R., & Orangzeb, K. (2019). Poverty Reduction Strategies. Exploring the link between Poverty and Corruption from less developed countries. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valore*, *6*(2).
- (76) Sharaunga, S., & Mudhara, M. (2021). Analysis of Livelihood Strategies for Reducing Poverty Among Rural Women’s Households: A Case Study of KwaZulu-Natal, South Africa. *Journal of International Development*, *33*(1), 127–150. <https://doi.org/10.1002/jid.3516>
- (77) Sutter, C., Bruton, G. D., & Chen, J. (2019). Entrepreneurship as a solution to extreme poverty: A review and future research directions. *Journal of Business Venturing*, *34*(1), 197–214.
- (78) Szatmári, M. (2021). ScienceDirect ScienceDirect Proposal AHP method for Increasing the Security Level in the Proposal AHP method for Increasing the Security Level in the Railway Station Railway Station. *Transportation Research Procedia*, *55*, 1681–1688. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.07.159>
- (79) Tashayo, B., Honarbakhsh, A., Akbari, M., & Eftekhari, M. (2020). Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences Land suitability assessment for maize farming using a GIS-AHP method for a semi- arid region , Iran. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, *19*(5), 332–338. <https://doi.org/10.1016/j.jssas.2020.03.003>
- (80) Thurlow, J., Dorosh, P., & Davis, B. (2019). Demographic change, agriculture, and rural poverty. *Sustainable Food and Agriculture*, 31–53.
- (81) Titumir, R. A. M., & Titumir, R. A. M. (2021). Poverty and inequality in Bangladesh. *Numbers and Narratives in Bangladesh’s Economic Development*, 177–225.

- (82) Topuz, S. K., & Erkanlı, H. (2020). An applied study on women's poverty in Turkey in the context of the capability approach. *International Journal of Social Economics*.
- (83) Tuyen, T. Q. (2015). *Socio-Economic Determinants of Household Income among Ethnic Minorities in the North-West Mountains , Vietnam*. 17(1), 139–159. <https://doi.org/10.15179/ces.17.1.5>
- (84) Ukeje, I. O., Ogbulu, U., & Amaefula, V. C. (2020). Human capital intervention and poverty reduction. *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Springer.
- (85) Walker, R. (2019). Rethinking poverty in a dynamic perspective. In *Empirical poverty research in a comparative perspective* (pp. 29–50). Routledge.
- (86) Watmough, G. R., Marcinko, C. L. J., Sullivan, C., Tschirhart, K., Mutuo, P. K., Palm, C. A., & Svenning, J.-C. (2019). Socioecologically informed use of remote sensing data to predict rural household poverty. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(4), 1213–1218.
- (87) Wolnowska, A. E., & Konicki, W. (2019). ScienceDirect ScienceDirect Multi-criterial analysis of oversize cargo transport through the city , Multi-criterial analysis of oversize cargo transport through the city , using the AHP method using the AHP method Green Cities 2018. *Transportation Research Procedia*, 39(2018), 614–623. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.06.063>
- (88) Yamamori, T. (2019). The Smithian ontology of 'relative poverty': revisiting the debate between Amartya Sen and Peter Townsend. *Journal of Economic Methodology*, 26(1), 70–80.
- (89) Zhou, Y., Guo, L., & Liu, Y. (2019). Land consolidation boosting poverty alleviation in China: Theory and practice. *Land Use Policy*, 82, 339–348.
- (90) Zhou, Y., & Liu, Y. (2019). The geography of poverty: Review and research prospects. *Journal of Rural Studies*.
- (91) Zhü, K. (2014). *Fuzzy analytic hierarchy process: Fallacy of the popular methods*. 236, 209–217. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2013.10.034>